

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi menuntut adanya kompetisi dari semua negara untuk saling bersaing guna memperebutkan kedudukan sebagai negara penentu dalam bidang perekonomian, sosial budaya, maupun politik. Tidak ketinggalan dalam hal ini dituntut kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia agar lebih baik. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai pelaku dan penggerak semua itu. Unsur manusialah yang memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan maupun pencapaian hal semua tersebut di atas.

Keberhasilan pencapaian di sebuah organisasi, baik itu organisasi pemerintah non pemerintahan, tidak terlepas dari sekelompok manusia harus berkerja dengan penuh tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Agar sekelompok manusia ini dapat berkerja dengan baik, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, membimbing dan memimpin serta menjadi tauladan bagi pengikutnya.

Peranan kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Seorang kepala daerah dengan kemampuannya diharapkan dapat memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional dan mampu memandu perubahan ke arah yang lebih baik. Keberhasilan untuk memandu perubahan akan sangat ditentukan oleh kualitas Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) dalam mengembangkan visi dan misi organisasi pemerintahannya sehingga mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan agenda baru kebijakan nasional yang memberikan peluang dan wewenang kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan kehidupan rumah tangga daerahnya tanpa intervensi berlebihan dari Pemerintah Pusat. Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada

kabupaten/kota merupakan suatu upaya untuk melakukan pembangunan secara maksimal terhadap daerah tersebut dimana kabupaten/kota lebih dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan lebih dapat mengerti dan menangkap dengan tepat aspirasi masyarakat serta mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan ataupun program-program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat untuk menjawab berbagai tuntutan daerah yang mulai menjurus ke arah konflik disintegrasi bangsa. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didasari atas azas desentralisasi merupakan suatu bentuk pembangunan yang nyata terhadap kabupaten/kota. Namun kewenangan tersebut tidak mencakup semua bidang kestabilan nasional, jadi pembatasan ruang lingkup tersebut meliputi bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan pembentukan daerah Otonomi baru, atau lebih dikenal dengan pemekaran daerah baru dari daerah induknya. Kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induknya di Wilayah Republik Indonesia adalah Kabupaten XX. Pembentukan Kabupaten XX ini berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tentang Kabupaten XX Provinsi JB. Kabupaten XX yang merupakan kabupaten ke 26 (duapuluh enam) di Provinsi JB. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten X ini berbatasan dengan Kabupaten P dan Kabupaten S di sebelah barat dan utara, Kabupaten X dan Kota C di sebelah timur, serta Kabupaten C di sebelah barat dan timur. Kabupaten XX ini mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten X.

Lahirnya Kabupaten XX melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemekaran Kabupaten XX dari Kabupaten X sebagai kabupaten induk mempunyai tujuan yang sesuai dengan tujuan pemekaran wilayah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 129 tahun 2000 pasal 2. Adapun tujuan tersebut adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Pada bulan Juli 2008, Kabupaten XX mempunyai Bupati dan Wakil Bupati yang definitif. Hal ini ditandai dengan selesainya tugas dari Bapak Drs. H. TK, SH., MH. selaku Pejabat Sementara Bupati XX yang ditunjuk oleh Gubernur JB (pada saat itu menjabat Assisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Propinsi JB) dan dilantiknyanya Bapak "PDA" dan Bapak Drs. EN selaku Bupati dan Wakil Bupati XX pertama.

Pada masa kampanye, pasangan "PDA" dan Drs. EN mensosialisasikan visi-misi dan program-program unggulan yang akan dilaksanakan apabila mereka terpilih. Masyarakat pun menilai visi-misi dan program-program unggulan tersebut dan memberikan pilihan kepada pasangan ini karena dinilai memiliki visi-misi dan program-program unggulan yang terbaik dibandingkan calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya.

Dilantiknyanya pasangan ini selaku pemimpin di wilayah Kabupaten XX pada bulan Juli 2008, merupakan tonggak awal tantangan kepemimpinan mereka untuk merealisasikan janji-janji politik selama kampanye yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Namun walaupun sebagai pasangan yang terpilih dari pemilihan langsung, tidak menjamin visi misi dan semua program yang dijanjikan pada masa kampanye akan dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati XX selaku pemimpin formal terpilih di wilayahnya harus menampilkan praktik-praktik kepemimpinan agar visi-misi dan program-program unggulan dapat dilaksanakan. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati XX harus memformulasikan praktik-praktik kepemimpinan agar visi-misi dan program-program unggulan yang mereka usung, sejalan dengan tujuan pemekaran daerah, khususnya di Kabupaten XX. Walaupun dengan fasilitas infrastruktur yang terbatas, tetapi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi tujuan yang utama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik kepemimpinan Bupati XX dalam mendukung tercapainya tujuan dari pemekaran daerah. Apakah praktik kepemimpinan yang ditampilkan oleh Bupati XX sudah mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dimaksudkan dalam tujuan dari pemekaran daerah yang tercantum dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 atau belum.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada “PDA” sebagai orang nomor 1 (satu) di Kabupten XX yang memiliki kedudukan paling strategis dan sangat menentukan masa depan Kabupaten XX. Dengan demikian penulis dalam penelitian ini akan memusatkan kajiannya kepada “ **Praktik Kepemimpinan Bupati XX dalam Pencapaian Tujuan Pemekaran Daerah** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum fokus penelitian ini adalah analisis kepemimpinan berupa praktik kepemimpinan “PDA” di Pemerintahan Kabupaten XX dalam pencapaian tujuan pemekaran daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan “PDA” selaku Bupati di Pemerintahan Kabupaten XX menurut Teori *The Leadership Challenge* dari Kouzes dan Posner (2004)?
2. Bagaimana kepemimpinan “PDA” tersebut dipraktikkan dalam mewujudkan tujuan pemekaran daerah di Kabupaten XX?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepemimpinan “PDA” selaku Bupati di Pemerintahan Kabupaten XX menurut Teori *The Leadership Challenge* dari Kouzes dan Posner (2004)
2. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan “PDA” tersebut dipraktikkan dalam mewujudkan tujuan pemekaran daerah di Kabupaten XX.

1.4. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini menjadi lebih fokus sehingga didapat hasil yang optimal, maka penelitian ini dibatasi pada analisis praktik kepemimpinan Bupati XX di wilayah Kabupaten XX, terutama praktik kepemimpinan Bupati dalam mendukung pencapaian tujuan pemekaran daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian mengenai konsep-konsep kepemimpinan, menambah wacana serta sudut pandang baru dalam menganalisis kepemimpinan menghadapi masalah-masalah penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam kasus pemekaran daerah, serta menambah referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan (rekomendasi) bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang pemekaran daerah dan pencapaian tujuan dari pemekaran daerah, terutama di lokasi penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian ini terdiri dari enam bab dan ditulis berdasarkan sistematika berikut ini:

- Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat yang sifatnya teoritis maupun yang sifatnya praktis, serta dijelaskan pula sistematika penulisan yang digunakan dalam tesis ini.
- Bab 2 Kajian Pustaka, dalam bab kedua diuraikan konsep kepemimpinan “*The Leadership Challenge*” dari Kouzes dan Posner (2004) yang terkait lima praktik kepemimpinan teladan dan sepuluh komitmen kepemimpinan. Selain itu diuraikan pula konsep-konsep tentang otonomi daerah dan desentralisasi, konsep kebijakan publik, konsep pelayanan publik, serta konsep pemberdayaan masyarakat.

- Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ketiga ini dijelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dijelaskan juga siapa yang menjadi informan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dan bagaimana proses pengumpulan data dan teknik analisisnya.
- Bab 4 Gambaran Umum Kabupaten XX, dalam bab ini menguraikan tentang gambaran Kabupaten XX dari letak geografis, demografis, laju pertumbuhan ekonomi dan pencapaian IPM.
- Bab 5 Pembahasan, dalam bab pembahasan ini diuraikan data yang telah diperoleh dalam penelitian disertai dengan analisisnya berdasarkan kerangka teori dan desain penelitian yang digunakan dalam tesis ini.
- Bab 6 Kesimpulan dan saran, berisi tentang ringkasan dari hasil penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

